

**LAPORAN TAHUNAN
PT BPRS AL MABRUR KLATEN
TAHUN 2020**



**PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
AL MABRUR KLATEN**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.03/2019 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.03/2019, Tanggal 26 Desember 2019 maka telah disusun Laporan Tahunan, yang terdiri dari :

- A. Informasi Umum yang terdiri atas:
 - a) kepengurusan
 - b) kepemilikan
 - c) perkembangan usaha BPRS dan perkembangan kelompok usaha BPRS, memuat paling sedikit:
 - (1) Ikhtisar data keuangan penting
 - (2) Rasio keuangan
 - d) strategi dan kebijakan manajemen yang digunakan dalam mengelola dan mengembangkan usaha BPRS, termasuk informasi mengenai manajemen risiko
 - e) laporan manajemen yang menyajikan informasi mengenai pengelolaan BPRS dalam rangka penerapan tata kelola

- B. Laporan Keuangan Tahunan, terdiri atas:
 - 1) Neraca
 - 2) Laporan Laba Rugi
 - 3) Laporan Arus Kas
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5) Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan Kontijensi
 - 6) Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS); dan
 - 7) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardh

C. Informasi Lainnya:

- 1) Ikhtisar Kebijakan Akuntansi
- 2) Informasi penting lainnya

Sesuai dengan Hasil Audit KAP tanggal 1 Maret 2021 Laporan Keuangan Tahunan 2020 PT. BPRS AL MABRUR KLATEN telah di audit oleh auditor independen KAP Hadiono dan Rekan. Sejalan dengan kinerja tahun 2020, maka untuk tahun 2021 telah dibuat Rencana Bisnis dengan menempatkan pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga untuk menggerakkan ekonomi sektor riil dan peningkatan laba untuk kepercayaan *stakeholder*.

Klaten, 24 Juni 2021
PT. BPRS AL MABRUR KLATEN



M Hanny Naufal
Direktur Utama



Rosid Wahyu Nugroho
Direktur

Mengetahui,



Ir. H. Syamsul Ma'arif
Komisaris Utama



Ruswanto, S.Tp, M.P
Komisaris

DAFTAR ISI

BAB I INFORMASI UMUM	1
A. Kepengurusan	2
B. Kepemilikan.....	2
C. Perkembangan Usaha BPRS	3
D. Strategi dan kebijakan manajemen dalam mengelola dan mengembangkan usaha BPRS, termasuk informasi mengenai manajemen risiko.....	4
E. Laporan manajemen yang menyajikan informasi mengenai pengelolaan BPRS dalam rangka penerapan tata kelola	7
BAB II LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN	13
A. Neraca.....	13
B. Laporan Laba Rugi.....	14
C. Laporan Arus Kas	15
D. Laporan Perubahan Ekuitas	15
E. Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontijensi.....	16
F. Laporan sumber dan penggunaan dana Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS)	16
G. Laporan sumber dan penggunaan dana Qardh	16
BAB III INFORMASI LAINNYA.....	17
A. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	17
B. Informasi penting Lainnya	19
BAB IV PENUTUP.....	21

BAB I

INFORMASI UMUM

PT BPRS Al Mabrur Klaten, didirikan pada tanggal 08 April 2009 dengan akta Notaris HM. Tony Rodhiyarto SE., SH., Notaris di Surakarta, Nomor:04 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-24310.AH.01.01 Tahun 2009 tertanggal 03 Juni 2009.

Akta perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan pada tahun 2020 yaitu, akta notaris Titik Kusumawati, SH., notaris di Klaten, Nomor:12 tertanggal 26 Februari 2020 tentang perubahan Direksi dan Komisaris yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.0103-0126789 dengan surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan nomor S-362/KO.0301/2020, akta notaris Titik Kusumawati, SH., notaris di Klaten, nomor:05 tertanggal 29 April 2020 yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0206284 tentang perubahan data perseroan dan nomor AHU-AH.0103-0206283 tentang penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 30 April 2020 dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan nomor S-162/KO.03012/2020 tentang Persetujuan Rencana Penambahan Modal disetor PT BPRS Al Mabrur, akta notaris Titik Kusumawati, SH., notaris di Klaten, nomor: 01 tertanggal 02 September 2020 tentang perubahan Direksi dan Komisaris yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0381815 dengan surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan nomor S-715/KO.0301/2020 dan perubahan terakhir dengan akta notaris Titik Kusumawati, SH., notaris di Klaten, nomor: 02 tertanggal 16 Desember 2020 tentang perubahan modal dasar dan penambahan modal disetor/ditempatkan yang telah mendapat pengesahan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0419803 dengan surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan nomor S-964/KO.0301/2020.

Perusahaan bergerak dalam bidang Perbankan Syariah sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan melaksanakan kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah, deposito berjangka dengan prinsip mudharabah dan bentuk lain yang menggunakan prinsip wadiah dan mudharabah, serta menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip murabahah, istishna dana tau salam, mudharabah, musyarakah, ijarah dan qardh.

Sebagai badan usaha yang mengelola dana masyarakat, BPRS dituntut untuk menyajikan Laporan yang berkualitas, transparan dan harus dapat dipertanggung jawabkan. Laporan Tahunan merupakan sarana atau media pertanggungjawaban BPRS kepada stakeholder, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 35/POJK.03/2019 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan SEOJK Nomor 30/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Publikasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

A. Kepengurusan

PT. BPRS Al Mabrur Klaten telah beroperasi sejak tanggal 07 September 2009 melalui keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/40/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 08 Agustus 2009 tentang Pemberian Ijin Usaha PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Mabrur Klaten dengan kepengurusan meliputi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Direksi. Adapun susunan kepengurusan BPRS Al Mabrur Klaten terakhir dengan data sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

No	Nama	Jabatan
1	Ir. H. Syamsul Ma'arif	Komisaris Utama
2	Ruswanto, S.Tp, M.P	Komisaris

Dewan Pengawas:

No	Nama	Jabatan
1	H. Iskak Sulistiya, S.Ag	Ketua Dewan Pengawas Syariah
2	H. Muslich Wahid Mahdi, S.Ag	Anggota Dewan Pengawas Syariah

Dewan Direksi:

No	Nama	Jabatan
1	M Hanny Naufal	Direktur Utama
2	Rosid Wahyu Nugroho	Direktur

B. Kepemilikan

Berdasarkan Akte Notaris Titik Kusumawati SH., nomor:02 tertanggal 16 Desember 2020 tentang perubahan modal dasar dan penambahan modal disetor/ditempatkan yang telah mendapat pengesahan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.0103-0419803 dengan surat Otoritas Jasa Keuangan nomr S-964/KO.0301/2020, berikut komposisinya;

Modal Disetor	Rp 3.500.000.000,00
1 Modal Dasar	Rp 10.000.000.000,00
2 Modal Belum disetor	(Rp 6.500.000.000,00)

Pemegang saham mayoritas adalah Yayasan Al-Mabrur Klaten, yang dikuasakan kepada Drs. H. Muchtar Anshori M.PdI dan H. Mohammad Anis, SE sedangkan untuk pemegang saham minoritas adalah H. Hanif Wahyudi, SE sehingga susunan Pemegang sahamnya adalah sebagai berikut;

1. Yayasan Al-Mabrur Klaten	Rp. 3.495.000.000 ,-	99,86 %
2. H. HanifWahyudi	Rp. 5.000.000.-	0,14 %
Total	Rp. 3.500.000.000,-	100%

C. Perkembangan Usaha BPRS

Tahun 2020 merupakan periode yang bersejarah untuk BPRS Al Maburr, disaat kinerja yang kurang menggembirakan dan hampir masuk dalam pengawasan intensif Otoritas Jasa keuangan, pandemic *Corona Virus Disease* (Covid-19) menerpa dunia termasuk Indonesia. Kondisi ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi dunia, bahkan sebagian besar negara masuk dalam jurang resesi tidak terkecuali Indonesia.

Bisnis perbankan baik konvensional maupun syariah termasuk BPR dan BPRS merasakan dampak atas kasus Covid-19. Berbagai stimulus Otoritas Jasa Keuangan telah dikeluarkan dalam menghadapi kondisi ini untuk menjaga *performance* perbankan terjaga dengan baik, melalui POJK nomor 11/POJK.03/2020 dan POJK 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Corona Virus Disease2019.

Dengan melihat kondisi eksternal dan internal BPRS, Pemegang Saham dan pengurus BPRS Al mabrur Klaten melakukan pembenahan, diantaranya adalah:

- 1) Penggantian Dewan Direksi
- 2) Penggantian *Core Banking System*
- 3) Penambahan Modal Disetor
- 4) Pra Transformasi; Visi dan Misi, *Core Values*, Struktur Organisasi dan monitoring produktivitas karyawan.

Beberapa strategi diatas mampu menjawab kondisi BPRS Al Maburr Klaten di mata *stakeholder* dan regulator. Periode tahun 2020 merupakan tahun perubahan BPRS Al Maburr Klaten (*The New Bank Syariah Al Maburr Klaten*) dari kondisi yang kurang menggembirakan menuju kinerja yang cemerlang. Kondisi ini dapat dilihat dalam kinerja keuangan (*financial Performance*) tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang tersaji dalam pos-pos penting dan rasio keuangan sebagai berikut:

No	Indikator	Pencapaian		
		2019	2020	Persen (%)
1	Asset	Rp19.325.652.389,51	Rp75.294.990.717,66	289,6%
2	Dana Pihak Ketiga	Rp15.409.467.126,97	Rp66.190.626.401,75	329,5%
3	Pembiayaan	Rp11.508.412.850,00	Rp27.204.074.366,00	136,4%
4	Rasio Permodalan (CAR)	30,30%	17,69%	
5	Likuiditas (CR)	43,82%	25,59%	
6	ROA	2,22%	1,11%	
7	ROE	40,69%	10,12%	
8	NPF	34,65%	1,7%	
9	BOPO	77,51%	96,86%	
10	FDR	62%	37,55%	

Beberapa indikator pos-pos penting atau rasio keuangan tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, diantaranya adalah Permodalan (CAR), Cash Ratio, ROA, ROE, BOPO dan FDR. Atas kondisi tersebut dapat dijelaskan dengan *possible reason* sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan pembiayaan yang masih rendah, berdampak pada pendapatan bank yang belum optimal sehingga berdampak pada ROA dan ROE serta FDR.
- 2) Manajemen portfolio atas ABA (treasury) semakin efektif dilakukan agar tetap optimal, kondisi ini berdampak penurunan Cash ratio di banding tahun sebelumnya.
- 3) Terdapat pos-pos biaya yang membengkak sepanjang tahun 2020, diantaranya adalah investasi software dan hardware untuk mendukung *core banking system*, pengeluaran pesangon untuk 4 karyawan dan 1 pengurus, serta penambahan pegawai baru.
- 4) Produktivitas pegawai yang masih rendah

D. Strategi dan kebijakan manajemen dalam mengelola dan mengembangkan usaha BPRS termasuk informasi mengenai manajemen risiko

Dalam rangka pertumbuhan bisnis dan menjaga kinerja (*sustainable performance*) di tengah pandemi Covid-19, bank telah melakukan transformasi dengan menyusun dan menetapkan strategi serta kebijakan manajemen disegala bidang termasuk informasi tentang manajemen risiko.

1. Visi dan misi

Visi: Bank Syariah Terkemuka dan Modern

Misi:

 - a. Mewujudkan pertumbuhan yang berkesinambungan dan kontribusi positif serta kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan
 - b. Mewujudkan sinergi antar amal usaha Group Yayasan Jama'ah Haji Klaten
 - c. Memberikan layanan prima serta solusi kebutuhan jasa perbankan syariah berbasis teknologi

- d. Mewujudkan tata kelola perusahaan sehat serta mengembangkan SDM yang bertalenta dan berdaya saing
2. Arah kebijakan BPRS
- a. Transformasi organisasi Bank dengan implementasi Tiga Pilar (Bisnis, Risk dan Operation) dalam proses keputusan pembiayaan.
 - b. Meningkatkan fungsi intermediasi dengan meningkatkan pertumbuhan pembiayaan di beberapa segmen bisnis terutama pada segmen mikro, consumer, business banking dan pawning dengan minimal pencairan Rp15 Milyar/ Tahun.
 - c. Menerapkan penilaian kinerja pegawai dengan konsep KPI kolaboratif antara bagian bisnis dan operasional.
 - d. Mengimplementasikan system pengupahan gaji dengan komposisi fixed income dan variable income sebagai bentuk apresiasi karyawan yang berkontribusi positif
 - e. Penerapan prinsip syariah dan kehati-hatian dalam penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan.
 - f. Menjaga dan meningkatkan tingkat kesehatan Bank dalam kondisi sehat.
 - g. Meningkatkan pelayanan yang excellent kepada nasabah melalui simplifikasi produk, proses dan pengembangan IT berupa layanan e-channel.
 - h. Penerapan pipeline manajemen secara terukur untuk menjaga produktifitas setiap pegawai.
 - i. Meningkatkan peran SPI dalam melakukan pengawasan dan monitoring atas proses bisnis bank yang sehat dan akuntabel.
 - j. Menjaga portofolio pembiayaan melalui penguatan fungsi collection dan recovery serta maintenance secara masif.
 - k. Melakukan ekspansi jaringan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dan market share Bank.
3. Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Risiko BPRS
- a. Proses bisnis pembiayaan dengan implementasi tiga pilar
 - b. Transformasi proses pembiayaan melalui proses financing origin system (FOS) atau scoring pembiayaan.
 - c. Meningkatkan peran SPI dalam melakukan pengawasan dan monitoring atas proses bisnis bank yang sehat dan akuntabel.
 - d. Membuat rencana tindak dan laporan realisasi rencana tindak manajemen risiko dan tata kelola BPRS
 - e. Pertumbuhan pembiayaan yang prudent dan sustainable melalui fokus pembiayaan pada segment retail.
 - f. Pertumbuhan dana pihak ketiga yang fokus pada low cost fund(LCF)/ tabungan

- g. Pengembangan SDM melalui kegiatan training internal dan eksternal serta study banding kepada industry.
 - h. Pengembangan produk dan program pembiayaan serta pendanaan sesuai dengan kebutuhan nasabah dan berdaya saing.
 - i. Pengembangan layanan e-channel dalam rangka peningkatan layanan kepada nasabah.
4. Analisis Posisi BPRS dalam persaingan Usaha berdasarkan Aset dan/ atau lokasi
- a. Potensi market untuk segmen retail masih cukup besar dengan rencana ekspansi kantor di wilayah cawas dan kabupaten boyolali sehingga memperluas area coverage pelayanan Bank.
 - b. Asset Bank masih dapat ditumbuhkan seiring sinergi yang cukup baik dengan group amal usaha Yayasan Jama'ah Haji serta potensi industry halal yang sedang berkembang di wilayah kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali
5. Strategi penyaluran pembiayaan berdasarkan Jenis usaha.
- a. Penyaluran pembiayaan pada fokus sektor ekonomi dan sektor usaha yang menarik serta masih survive pada masa pandemi.
 - b. Segmen pembiayaan fokus pada segmen mikro, consumer, pawning dan business banking dengan account maintenance oleh marketing yang memiliki kompetensi sesuai spesifikasi.
6. Strategi pengembangan bisnis
- a. Mengoptimalkan potensi amal usaha Yayasan Jama'ah Haji melalui sinergi antar amal usaha dan potensi alumni jama'ah haji sebagai fokus base customer dalam rangka penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan.
 - b. Pengembangan personal branding perusahaan melalui spesialisasi produk pada produk haji, umroh dan investasi emas.
 - c. Pengembangan layanan Host To Host dan layanan e-channel dalam rangka pertumbuhan pendapatan dari Fee Base Income
7. Identifikasi dan Mitigasi Risiko
- a. Risiko Kredit
Merupakan risiko yang muncul akibat kegagalan nasabah dana tau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank.
Mitigasi risiko Kredit:
 - 1) SOP Pembiayaan
 - 2) Melakukan analisa yang memadai terhadap kepada nasabah pembiayaan atas usaha dan jaminan dengan 5C
 - 3) Melakukan penilaian terhadap kinerja Bank lain sebelum melakukan penempatan dana antar bank

b. Risiko Operasional

Merupakan risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan Sumber Daya Manusia (*Human error*), kegagalan system, dan atau kejadian eksternal BPRS.

Mitigasi Risiko Operasional:

- 1) Membuat perencanaan mencakup semua aktivitas bank dengan memperhatikan probabilitas kejadian risiko operasional, dampak dan besarnya kerugian bank.
- 2) Membuat langkah dengan *time line* untuk perbaikan
- 3) Memastikan kesiapan SDM dalam menjalankan operasional dengan selalu mengasah kompetensi.
- 4) Selalu berkoordinasi dengan vendor *core banking system* atas *update system*.

c. Risiko Kepatuhan

Risiko yang muncul akibat bank tidak memenuhi dana tau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk risiko akibat kelemahan aspek hukum.

Mitigasi Risiko Kepatuhan:

- 1) Selalu memperhatikan peraturan perbankan atas operasional bank, sebagai contoh pemenuhan modal minimum, BMPD
- 2) Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)
- 3) Pelatihan untuk seluruh karyawan minimum setahun sekali atas APU-PPT
- 4) Berkoordinasi aktif dengan Dewan Pengawas Syariah dalam menerapkan *Sharia Compliance*.

d. Risiko Likuiditas

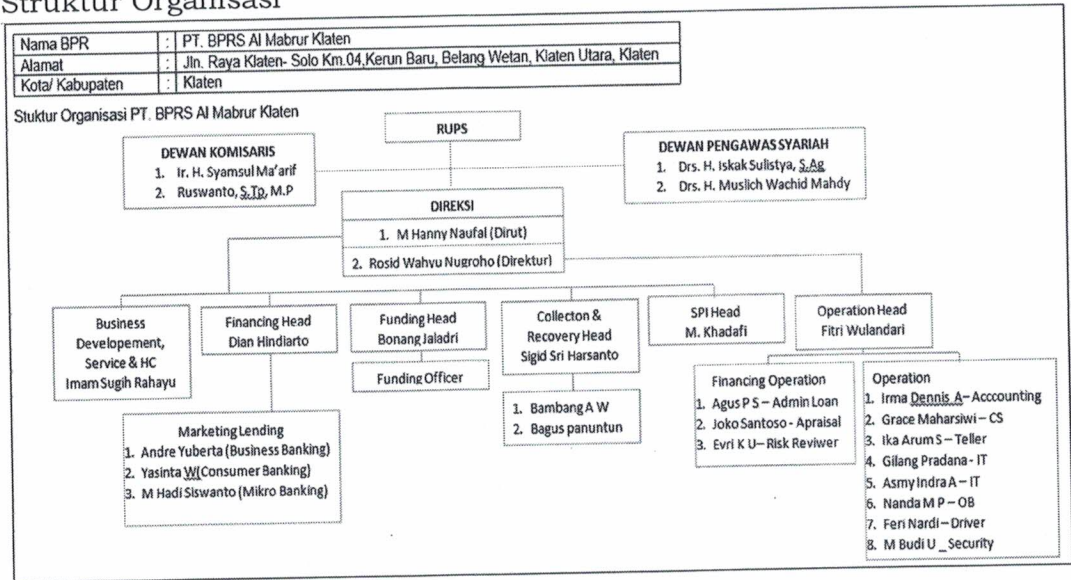
Jenis risiko yang muncul akibat ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dana tau kondisi keuangan.

Mitigasi Risiko Likuiditas:

- 1) Selalu menjaga cash ratio minimal yang ditetapkan regulator
- 2) Menggunakan manajemen portfolio atas ABA dengan baik (aktivitas *Treasury*)
- 3) Memberikan informasi kepada nasabah untuk penarikan nominal tertentu, makukan konfirmasi kepada Bank satu hari sebelumnya.

E. Laporan manajemen yang menyajikan informasi mengenai pengelolaan BPRS dalam rangka penerapan tata kelola

1) Struktur Organisasi



2) Aktivitas Utama

Aktivitas utama bank adalah menjalankan perannya sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang dan aturan regulator, yaitu melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan skema syariah untuk menggerakkan perekonomian masyarakat serta jasa-jasa lainnya yang diperbolehkan regulator.

3) Teknologi Informasi

Dalam rangka mendukung kegiatan operasional bank dan pelayanan maksimal kepada nasabah, Bank telah melakukan upgrade core banking system IBA (Islamic Banking System) pada bulan Juni 2020 dengan bekerjasama PT Mitra Soft Global Perdana dan telah dilaksanakan pelaporannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

4) Produk dan Jasa Perbankan

Selama periode tahun 2020, produk dan jasa yang ditawarkan PT BPRS Al Maburr Klaten kepada masyarakat adalah produk penempatan dana, pembiayaan dana jasa lainnya. Berikut perincian produk dan Jasa PT BPRS Al Maburr Klaten;

Produk penempatan dana:

- Tabungan Ib Al Maburr Wadiah
- Tabungan Ib Al maburr Mudharabah
- Deposito Ib Al Maburr Mudharabah 1 bulan
- Deposito Ib Al Maburr Mudharabah 3 bulan
- Deposito Ib Al Maburr Mudharabah 6 bulan

- Deposito Ib Al Mabrur Mudharabah 12 bulan

Produk Pembiayaan:

- Pembiayaan Murabahah
- Pembiayaan Mudharabah
- Pembiayaan Musyarakah
- Pembiayaan Ijarah
- Pembiayaan piutang Multijasa

Jasa-jasa:

- Jasa transfer
- Jasa pembayaran PPOB

5) Realisasi Bagi Hasil

Selama periode tahun 2020, BPRS Al Mabrur Klaten telah mendistribusikan pendapatan dari penyaluran dana dan asset produktif kepada para pemilik dana sebagai bagi hasil sebesar Rp 3.254.434.264,88 dengan data sebagai berikut;

No	Jenis Produk	Nominal
1	Tabungan Mudharabah	Rp 264.252.289,22
2	Deposito Mudharabah 1 bulan Perorangan	Rp 53.278.561,00
3	Deposito Mudharabah 3 bulan Perorangan	Rp 144.564.209,00
4	Deposito Mudharabah 6 bulan Perorangan	Rp 133.062.772,00
5	Deposito Mudharabah 12 bulan Perorangan	Rp 185.870.293,00
6	Deposito Mudharabah 1 bulan Badan Hukum	Rp 197.906.350,00
7	Deposito Mudharabah 3 bulan Badan Hukum	Rp 15.339.764,00
8	Deposito Mudharabah 6 bulan Badan Hukum	-
9	Deposito Mudharabah 12 bulan Badan Hukum	Rp 185.849.813,00
10	Deposito Mudharabah Muqayyadah	Rp 2.968.040,00
Total distribusi Bagi hasil kepada pemilik dana		Rp1.183.092.091,22

6) Perkembangan dan Target Pasar

Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat penting untuk BPRS Al Mabrur Klaten, diantara peristiwa penting seperti;

- NPF Triwulan I tahun 2020 sebesar 34,65%
- BPRS hampir masuk dalam Pengawasan Intensif OJK
- Pergantian Manajemen (Dewan Direksi)
- Pra Transformasi The new Al Mabrur dilakukan

Dengan semangat perubahan yang dilakukan BPRS Al Mabrur Klaten, baik bidang operasional dan bisnis BPRS Al Mabrur Klaten mampu bertahan dan tumbuh dengan pesat untuk posisi tahun 2020, dengan data kinerja keuangan sebagai berikut:

No	Indikator	Pencapaian		
		2019	2020	Persen (%)
1	Asset	Rp19.325.652.389,51	Rp75.294.990.717,66	289,6%
2	Dana Pihak Ketiga	Rp15.409.467.126,97	Rp66.190.626.401,75	329,5%
3	Pembiayaan	Rp11.508.412.850,00	Rp27.204.074.366,00	136,4%
4	NPF	34,65%	1,7%	

Peningkatan kinerja keuangan tidak terlepas dari penetrasi atau segmentasi pasar yang dilakukan BPRS Al Maburr Klaten. Untuk tumbuh besar BPRS Al Maburr Klaten sudah memulai untuk memberanikan diri berkompetisi dengan Bank Umum, hal ini tercermin semakin banyaknya jaringan BMT di wilayah Klaten dan Boyolali yang sudah menjadi nasabah BPRS Al Maburr Klaten. Selain itu banyak pengusaha segmen bisnis banking di daerah Klaten dan sekitarnya yang sudah memanfaatkan layanan BPRS Al Maburr Klaten.

- 7) Jaringan Kerja dan Mitra Usaha
- Selama periode tahun 2020 jaringan kerja dan mitra usaha BPRS Al Maburr Klaten semakin luas dan masif. Hal ini tercermin dari pertumbuhan bisnis, baik dari segi penghimpunan dana masyarakat maupun penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat semakin meningkat, dengan transformasi disegala bidang yang dilakukan BPRS Al Maburr Klaten terutama dalam pelayanan kepada nasabah. Adapun jaringan kerja dan mitra usaha seperti;
- Bidang Promosi, bekerjasama dengan Radio Salma untuk pemutaran iklan dan Talk show di Radio.
 - Bidang Treasury, bekerjasama dengan Bank Umum Syariah; BSI, BMI, Bank Mega Syariah, Bank Jateng Syariah, Permata Syariah, dan beberapa BPRS seluruh Indonesia.
 - Bidang Bisnis, bekerjasama dengan amal usaha Yayasan Jamaah Haji Klaten (RSI Klaten, RSI Cawas, Radio Salma, Gedung Al Maburr), jaringan BMT di wilayah Klaten dan Boyolali, Bank Jateng Syariah, Developer, Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kemenag Kabupaten Klaten, BAZDA Klaten, MUI Klaten dan Amal Usaha Muahmmadiyah serta Nahdatul Ulama di Kabupaten Klaten.
- 8) Jumlah, Jenis dan Lokasi Kantor
- Tahun 2020, PT BPRS Al Maburr Klaten menjalankan operasional dengan satu kantor tunggal yang beralamat di Jalan Raya Klaten-Solo Km.04, Kerunbaru, Belangwetan, Klaten Utara, Klaten.

- 9) Kepemilikan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham dalam kelompok usaha BPRS dan perubahannya.

Tahun 2020, terdapat perubahan kepemilikan Pemegang Saham BPRS dengan perincian sebagai berikut;

No	Nama	Sebelum			Sesudah		
		Lembar	Nominal	%	Lembar	Nominal	%
1	Yayasan Al Mabrur	1.995	1.995.000.000	99,75	3.495	3.495.000.000	99,86
2	Hanif Wahyudi	5	5.000.000	0,25	5	5.000.000	0,14
Jumlah		2.000	2.000.000.000	100	3.500	3.500.000.000	100

- 10) Perubahan penting yang terjadi di BPRS tahun 2020
 Selama periode tahun 2020, terdapat perubahan kepengurusan PT BPRS Al Mabrur Klaten. Adapun perubahan yang dilakukan adalah perombakan Dewan Direksi dengan perincian sebagai berikut;

No	Dewan Direksi Lama		Dewan Direksi Baru	
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan
1	-	Direktur Utama	M Hanny Naufal	Direktur Utama
2	Chairil Abas	Direktur	Rosid Wahyu Nugroho	Direktur

- 11) Pengembangan Sumber Daya Manusia (*Human Capital*)
 Dalam menghadapi tantangan bisnis dan regulasi yang semakin ketat dalam dunia perbankan, selama tahun 2020 BPRS Al Mabrur Klaten mengikut sertakan pegawai dalam peningkatan kompetensi dan pengembangan pegawai melalui pelatihan-pelatihan, dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Pelatihan	Peserta	Penyelenggara
1	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	2 Staff Remedial	ASBISINDO-BPRS
2	Impelementasi IBA	Seluruh User	PT MGP
3	Analisa Pembiayaan	Business Head	ASBISINDO-BPRS
4	Cara Melakukan AYDA	Operasional	ASBISINDO-BPRS
5	Analisa Pembiayaan Sindikasi	Team Lending	ASBISINDO-BPRS
6	Tata Kelola BPRS	All Karyawan	ASBISINDO-BPRS
7	Pra-Ijtima' sanawi Perbankan	DPS	DSN-MUI
8	Penyusunan Rencana Bisnis Bank	Direktur	ASBISINDO-BPRS
9	Strategi Meraih Dana Murah	Direktur, Funding	ASBISINDO-BPRS
10	Problem Solving Pembiayaan	Collection and Recovery	ASBISINDO-BPRS
11	Penilaian Jaminan	Appraisal Staff	MAPPI
12	Internal Audit	SPI	ASBISINDO-BPRS

- 12) Pengungkapan kebijakan yang mencakup fess and salaries/gaji bagi Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah termasuk bonus, tantiem dan atau fasilitas lain.

PT BPRS Al Mabrur Klaten telah membuat kebijakan terkait penetapan honor bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah serta gaji dan tunjangan bagi Dewan Direksi, melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Khusus kebijakan bonus dan tantiem disesuaikan dengan kondisi dan kinerja perusahaan. Berikut komposisi honor atau gaji untuk pengurus;

Honor dan Tunjangan Dewan Komisaris:

- Honor
- Tunjangan Hari Raya
- Tunjangan PPh Pasal 21

Honor dan Tunjangan Dewan Pengawas Syariah:

- Honor
- Tunjangan Hari Raya
- Tunjangan PPh Pasal 21

Gaji dan Tunjangan Dewan Direksi:

- Gaji Pokok
- Tunjangan Jabatan
- Tunjangan Komunikasi
- Tunjangan BPJS Kesehatan
- Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan
- Tunjangan Hari Raya
- Tunjangan PPh Pasal 21

BAB II
LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

A. Neraca

I. Asset

Keterangan	2020	2019	(jutaan)	
			Pencapaian	
			Rp	%
Asset				
Kas	Rp 117	Rp 123	-Rp 6	-5%
Aktiva Produktif	Rp 73,328	Rp 19,081	Rp 54,247	284%
Penempatan Pada Bank Lain	Rp 46,125	Rp 7,571	Rp 38,554	509%
Pembiayaan	Rp 27,203	Rp 11,510	Rp 15,693	136%
Piutang Murabahah	Rp 16,129	Rp 10,753	Rp 5,376	50%
Piutang Multijasa	Rp 2,185	Rp 529	Rp 1,656	313%
Pembiayaan Mudharabah	Rp 1,381	0	Rp 1,381	#DIV/0!
Pembiayaan Musyarakah	Rp 4,750	Rp 223	Rp 4,527	2030%
Pembiayaan Ijarah	Rp 2,758	Rp 5	Rp 2,753	55060%
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif		-Rp 1	Rp -	-100%
Aktiva Tetap/Inventaris	Rp 271	Rp 43	Rp 228	530%
Rupa-rupa Aktiva	Rp 1,578	Rp 79	Rp 1,499	1897%
Total Asset	Rp 75,294	Rp 19,325	Rp 55,969	290%

Total Asset tercapai 290% posisi tahun 2020 sebesar Rp 75,2 M dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 19,3M. Pertumbuhan asset di dominasi oleh Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun oleh BPRS Al Maburr Klaten.

II. Kewajiban dan Modal

Keterangan	2020	2019	(jutaan)	
			Pencapaian	
			Rp	%
Kewajiban				
Kewajiban segera	Rp 319	Rp 80	Rp 239	299%
Simpanan Dana Pihak Ketiga	Rp 66,189	Rp 15,408	Rp 50,781	330%
Tabungan wadiah	Rp 30	Rp 12	Rp 18	150%
Tabungan Mudharabah	Rp 16,087	Rp 6,676	Rp 9,411	141%
Deposito Mudharabah	Rp 50,072	Rp 8,720	Rp 41,352	474%
Kewajiban Lainnya	Rp 2,059	Rp 103	Rp 1,956	1899%
Pinjaman Diterima	Rp -	Rp -	Rp -	-
Rupa-rupa Pasiva	Rp 283	Rp 146	Rp 137	94%
Modal:	Rp 10,000		Rp 10,000	-
Modal Disetor	Rp 3,500	Rp 1,000	Rp 2,500	250%
Modal belum disetor	Rp 6,500	-	-	-
Tambahan Modal Disetor		Rp -	Rp -	-
Cadangan	Rp 200	Rp 200	Rp -	0%
Laba/Rugi Tahun Lalu	Rp 2,387	Rp 1,980	Rp 407	21%
Laba/Rugi Tahun Berjalan	Rp 354	Rp 406	-Rp 52	-13%
Kewajiban dan Ekuitas	Rp 75,294	Rp 19,325	Rp 55,969	290%

Tahun 2020 BPRS Al Maburr Klaten melakukan perubahan modal dasar sebesar Rp 10M, sedangkan modal disetor sebesar Rp 3,5M serta modal yang belum disetor sebesar Rp 6,5M.

B. Laporan Laba Rugi

(jutaan)				
Keterangan	2020	2019	Pencapaian	
			Rp	%
Pendapatan dan Beban Operasional				
Pendapatan Operasional				
Pendapatan Operasional	Rp 2,747	Rp 2,420	Rp 327	114%
Pendapatan Bagi Hasil	Rp 508	Rp 302	Rp 206	168%
Pendapatan Operasional Lainnya	Rp 259	Rp 172	Rp 87	151%
Jumlah Pendapatan Operasional bersih	Rp 3,514	Rp 2,894	Rp 620	121%
Beban Operasional			Rp -	#DIV/0!
Bagi Hasil Kepada Pemilik Dana	Rp 1,312	Rp 961	Rp 351	137%
Beban Bonus Titipan Wadiah			Rp -	#DIV/0!
Beban Tenaga Kerja	Rp 1,370	Rp 1,177	Rp 193	116%
Beban Administrasi dan Umum	Rp 247	Rp 195	Rp 52	127%
Beban Amortisasi dan Penyusutan	Rp 371	Rp 33	Rp 338	1124%
Beban Operasional lainnya	Rp 104	Rp 94	Rp 10	111%
Jumlah Beban Operasional	Rp 3,404	Rp 2,460	Rp 944	138%
Lab Operasional	Rp 110	Rp 434	-Rp 324	25%
Pendapatan Non Operasional			Rp -	#DIV/0!
Pendapatan Non Operasional	Rp 277		Rp 277	#DIV/0!
Beban Non Operasional	Rp 15	Rp 14	Rp 1	107%
Pendapatan Non Operasional Bersih	Rp 262	-Rp 14	Rp 276	-1871%
Lab Bersih Sebelum Pajak	Rp 372	Rp 420	-Rp 48	89%
Pajak Penghasilan			Rp -	#DIV/0!
Beban Pajak Penghasilan	Rp 18	Rp 14	Rp 4	129%
Jumlah Pajak Penghasilan	Rp 18	Rp 14	Rp 4	129%
Lab/Rugi Setelah Pajak	Rp 354	Rp 406	-Rp 52	87%

Pendapatan penyaluran pembiayaan tercapai 114% dari tahun sebelumnya Rp2,4M tumbuh menjadi Rp2,7M, peningkatan ini sebagai dampak dari pertumbuhan pembiayaan yang tercapai sebesar 136% pada tahun 2020. Sedangkan pendapatan dari bagi hasil atas penempatan bank lain juga mengalami peningkatan sebesar 168% dan pendapatan operasional lainnya sebesar 151%.

Dari pos beban operasional juga mengalami peningkatan sebesar 138% sebesar Rp3,4M dari tahun sebelumnya sebesar Rp2,4M, adapun beban terdiri dari beban bagi hasil kepada pemilik dana, beban bonus titipan wadiah, beban tenaga kerja, beban administrasi dan umum, beban amortisasi dan penyusutan serta operasional lainnya.

C. Laporan Arus Kas

	(jutaan)	
	2020	2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp 354	Rp 406
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi		
Penyusutan Aset Tetap	-Rp 16	Rp 32
Penyusutan Aset Ijarah	Rp 36	Rp 21
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp 14	
Penyisihan kerugian (pembalikan atas penyisihan) untuk:		
Pembiayaan	-Rp 1	-Rp 3
Perubahan Asset dan kewajiban operasi:		
Penurunan (Kenaikan) penempatan pada Bank lain	-Rp 38,554	-Rp 2,293
Penurunan (Kenaikan) Piutang Marabah	-Rp 5,377	Rp 832
Penurunan (Kenaikan) Piutang Multijasa	-Rp 1,656	Rp 150
Penurunan (Kenaikan) Pembiayaan	-Rp 5,908	Rp 646
Penurunan (Kenaikan) agunan yang diambil alih	-Rp 1,311	
Penurunan Asset lain-lain	-Rp 186	-Rp 6
Kenaikan (Penurunan) kewajiban segera	Rp 240	-Rp 6
Kenaikan simpanan	Rp 50,781	Rp 354
Kenaikan Kewajiban Pada Bank lain	Rp 1,952	Rp 5
Kenaikan (Penurunan) kewajiban lain-lain	Rp 140	-Rp 41
Arus kas bersih dari aktivitas operasional	Rp 506	Rp 99
Arus kas dari aktivitas investasi		
Pembelian aset tetap	-Rp 129	-Rp 38
Penjualan (pembelian) aset tidak berwujud	-Rp 95	
Penjualan (pembelian) aset ijarah	-Rp 2,788	
Arus kas bersih dari (dipergunakan untuk) aktivitas investasi	Rp 3,012	-Rp 38
Arus Kas dari aktivitas pendanaan		
Penambahan (Pengurangan) modal	Rp 2,500	-
Arus Kas bersih dipergunakan untuk aktivitas pendanaan	Rp 2,500	-
Kas bersih yang tersedia (digunakan)	-Rp 6	Rp 61
Saldo awal kas	Rp 123	Rp 62
Saldo akhir kas	Rp 117	Rp 123

D. Laporan Perubahan Ekuitas

	Saldo Laba (juta)			
	Modal Disetor	Cadangan Umum	Saldo Laba (Rugi)	Ekuitas - Bersih
Saldo tanggal 31 Desember 2018	Rp 1,000.00	Rp 200.00	Rp 1,981.00	Rp 3,180.00
Laba	-	-	Rp 406.00	Rp 406.00
Saldo Tanggal 31 Desember 2019	Rp 1,000.00	Rp 200.00	Rp 2,387.00	Rp 3,587.00
Penambahan Modal 2020	Rp 2,500.00	-	-	Rp 2,500.00
Laba 2020	-	-	Rp 354.00	Rp 354.00
Saldo tanggal 31 Desember 2020	Rp 3,500.00	Rp 200.00	Rp 2,742.00	Rp 6,442.00

E. Laporan komitmen dan Kontijensi

	2020	2019
KOMITMEN		
Tagihan Komitmen		
Fasilitas pinjaman yang diterima belum ditarik	-	-
Tagihan Komitmen lainnya	-	-
Kewajiban Komitmen		
Fasilitas Kredit nasabah yang belum ditarik	-	-
Kewajiban komitmen lainnya	Rp 193.00	-
KONTIJENSI		
Tagihan Kontijensi		
Pendapatan Yang Akan Diterima		
Pendapatan Margin Muarabahah	Rp 196.00	Rp 708.00
Aset Produktif	Rp 707.00	
Lainnya	-	Rp 33.00
Kewajiban Kontijensi		
Aset Produktif yang dihapusbukukan	Rp 233.00	Rp 200.00

F. Laporan sumber dan penggunaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS)

	2020	2019
Sumber dana Qardh		
Denda	-	Rp 4,563,944.00
Jumlah Sumber Dana	-	Rp 4,563,944.00
Penggunaan Dana Qardh		
Sumbangan	Rp 7,819,312.00	Rp 3,500,000.00
Jumlah Penggunaan Dana	Rp 7,819,312.00	Rp 3,500,000.00
Kenaikan (Penurunan) Sumber Atas Penggunaan	-Rp 7,819,312.00	Rp 1,063,944.00
Sumber dana Qardh awal Periode	Rp 8,201,914.00	Rp 7,137,970.00
Sumber dana Qardh akhir Periode	Rp 382,602.00	Rp 8,201,914.00

G. Laporan sumber dan penggunaan dan Qardh

	2020	2019
Sumber Dana ZIS		
Zakat dari pihak ketiga bukan Bank	Rp 703.82	Rp 22,949.10
Zakat dari Bank	Rp 9,091,598.00	Rp 10,803,499.00
Infak dan Sadaqah	-	-
Jumlah Sumber dana	Rp 9,092,301.82	Rp 10,826,448.10
Penggunaan Dana ZIS		
Disalurkan ke Lembaga/pihak Lain	Rp 10,803,499.00	Rp 11,728,500.00
Disalurkan sendiri	-	-
Jumlah Penggunaan dana	Rp 10,803,499.00	Rp 11,728,500.00
Kenaikan (Penurunan) Sumber atas penggunaan	-Rp 1,711,197.18	-Rp 902,051.90
Sumber dana ZIS awal Periode	Rp 11,494,840.37	Rp 12,396,892.27
Sumber dana ZIS akhir Periode	Rp 9,783,643.19	Rp 11,494,840.37

BAB III

INFORMASI LAINNYA

A. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a) Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) nomor 59 dan SAK 101 sampai dengan 107 (revisi 2010) serta Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) tahun 2003.

Dasar akuntansi yang digunakan pada perhitungan hasil usaha (laba/rugi) periodic dan penentuan posisi keuangan dilakukan dengan metode akrual yaitu pada saat terjadinya transaksi diakui adanya hak dan kewajiban perusahaan. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

b) Penempatan Pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar nilai nominal penyetoran atau nilai yang diperjanjikan sesuai dengan jenis penempatan.

c) Penilaian Piutang

Piutang Murabahah dan Piutang Istishna disajikan dalam laporan keuangan dengan nilai tunai yang dapat direalisasikan. Piutang yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih dibuatkan penyisihan penghapusannya.

d) Penilaian Pembiayaan

Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah disajikan dalam laporan keuangan dengan nilai tunai yang dapat direalisasikan. Pembiayaan yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih dibuatkan penyisihan penghapusannya. Pinjaman Qardh disajikan dalam laporan keuangan dengan nilai tunai yang dapat direalisasikan. Pembiayaan yang memiliki kemungkinan tidak tertagih dibuatkan penyisihan penghapusannya.

e) Aset Ijarah

Aset Ijarah disajikan dalam laporan keuangan dengan harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan aset ijarah adalah sebagaimana aset tetap.

f) Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi dan dibebankan pada laba rugi selama masa manfaatnya.

g) Pendapatan dan Beban Bagi Hasil/Bonus

Perusahaan mengakui pendapatan atas dasar accrual dan beban bagi hasil atas data akrual, kecuali untuk beban-beban yang pasti akan keluar dalam tahun berjalan. Pendapatan bagi hasil atas aset produktif yang diklasifikasikan sebagai non performing, diakui dalam akun sampai saat diterimanya pembayaran. Pendapatan jual beli dari marjin murabahah, salam, serta ishtisna parallel diakui pada saat penerimaan angsuran. Pendapatan ijarah diakui pada saat angsuran sewa (ijarah) diterima oleh bank dari nasabah. Pendapatan dari transaksi multijasa diakui pada saat angsuran diterima dari nasabah.

h) Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

Perusahaan wajib membentuk PPAP yang dimiliki guna menutup resiko kemungkinan kerugian piutang dan pembiayaan tidak tertagih. Besarnya pembentukan PPAP sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29/POJK.03/2019 sebagai berikut:

Lancar	: 0,5% dari Saldo Debet
Dalam Perhatian Khusus	: 0,5% dari Saldo Debet dikurangi jaminan yang diperhitungkan
Kurang Lancar	: 10% dari Saldo Debet dikurangi jaminan yang diperhitungkan
Diragukan	: 50% dari Saldo Debet dikurangi jaminan yang diperhitungkan
Macet	: 100% dari Saldo Debet dikurangi jaminan yang diperhitungkan

Berdasarkan Peraturan otoritas Jasa Keuangan nomor 34/POJK.03/2020 tentang kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 maka BPR atau BPRS dapat membentuk penyisihan penghapusan aset produktif dengan kualitas lancar kurang dari 0,5% dari aset produktif dengan kualitas lancar atau tidak membentuk penyisihan penghapusan aset produktif umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar.

i) Aset Tetap

Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehannya, yaitu harga pembelian atau biaya pembangunannya ditambah dengan semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tetap dan inventaris yang bersangkutan berada pada tempat dan kondisi siap dipergunakan. Penyusutan aset tetap selain tanah dengan menggunakan metode garis lurus (straight Line Method) dan disesuaikan dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2008, agar dapat menghitung beda tetap dalam menentukan besarnya laba. Tariff penyusutan sebagai berikut:

	Tarif Penyusutan (%)	Masa Manfaat (th)
Gedung	: 5%	20
Kendaraan	: 25%	4
Inventaris Golongan I	: 25%	4
Inventaris Golongan II	: 12,5%	8

Aset tetap yang rusak atau tidak dapat dipergunakan lagi karena sebab-sebab normal disajikan terpisah dalam kelompok aset lain-lain. Pelaksanaan dilakukan dengan keputusan Direksi setelah oleh Dewan Komisaris dan dibebankan sebagai biaya lain-lain.

j) Perpajakan

Beban pajak penghasilan adalah jumlah agregat beban pajak penghasilan terutang kena pajak yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada satu periode atau ditetapkan tersendiri, sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Pajak dihitung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2018 tentang "Pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan tariff 0,5% dari peredaran bruto".

B. Informasi penting lainnya

i. Opini Akuntan Publik

Menurut opini Akuntan Publik Hadiono dan Rekan dengan nomor surat 00024/2.1267/AU.2/07/0108-3/I/III/2021 tanggal 1 Maret 2021, bahwa laporan keuangan PT BPRS Al Mabur Klaten menyajikan **secara wajar**, dalam semua hal yang material atas posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

ii. *Manajemen Letter*

Manajemen letter Akuntan Publik Hadiono dan Rekan dengan nomor surat 033/KAP/HDR/III/2021 tanggal 1 Maret 2021.

a. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja

Bahwa BPRS Al Mabur Klaten belum memperhitungkan atau mencadangkan imbalan pasca kerja pada tahun 2020 dengan menggunakan jasa aktuaris

Rekomendasi:

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.24 (Revisi 2004) tentang imbalan pasca kerja dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, disarankan untuk menghitung dan mencadangkan imbalan pasca kerja yang sesuai dengan menggunakan jasa aktuaris.

b. Nominatif Pembiayaan-Ijarah

BPRS dalam memperhitungkan penyusutan nominative pembiayaan Ijarah berbeda dengan neraca. Penyusutan Ijarah di neraca dihitung secara flat sedangkan di nominative penyusutan dihitung secara anuitas atau menurun.

Rekomendasi:

BPRS menghitung penyusutan Ijarah sesuai dengan nominatifnya sehingga tidak ada perbedaan pencatatan antara nominative dan neraca karena akan berpengaruh dengan hasil laporan keuangan.

c. Perhitungan Pembentukan Penyisihan Aset Produktif

Bahwa BPRS tidak membentuk/memperhitungkan penyisihan penghapusan aset produktif/PPAP untuk pembiayaan. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 34/POJK.03/2020, BPRS harus membentuk PPAP dengan ketentuan sebagai berikut:

Lancar	: 0,5% dari Saldo Debet
Dalam Perhatian Khusus	: 0,5% dari Saldo Debet dikurangi jaminan yang diperhitungkan
Kurang Lancar	: 10% dari Saldo Debet dikurangi jaminan yang diperhitungkan
Diragukan	: 50% dari Saldo Debet dikurangi jaminan yang diperhitungkan
Macet	: 100% dari Saldo Debet dikurangi jaminan yang diperhitungkan

Risiko:

- Pembentukan PPAP bertujuan untuk menutupi risiko kemungkinan kerugian yang timbul akibat memburuknya tingkat kolektibilitas aset, sehingga jika tidak membentuk PPAP dikhawatirkan perusahaan mengalami kebangkrutan akibat tidak diterimnya kembali sebagian atau seluruh aset produktif.
- Terdapat ketidaksesuaian laporan keuangan bank dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan nomor 34/POJK.03/2020.

Rekomendasi:

Disarankan melakukan perhitungan penyisihan penghapusan aset produktif/PPAP berdasarkan Peraturan otoritas Jasa Keuangan nomor 34/POJK.03/2020.

BAB IV
PENUTUP

Demikian laporan Tahunan periode tahun buku 2020 PT. BPRS Al Mabrur Klaten ini dibuat dengan maksud untuk diketahui atas perkembangan selama periode tertentu yang kami bandingkan akhir tahun 2019 dengan akhir tahun 2020 dengan harapan dapat digunakan untuk program kerja tahun yang akan datang.

Dari laporan ini juga diharapkan dapat digunakan oleh para pemegang saham dalam membuat strategi dan kebijakan pada Rapat Umum Pemegang Saham di masa mendatang, dengan tujuan memantapkan visi dan misi BPRS.

Pada akhirnya kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas sekaligus pembina, kami ucapkan terima kasih atas bimbingan dan pembinaan yang dilakukan agar terwujud bank yang sehat.

Wassalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh

Klaten, 24 Juni 2021

PT. BPRS AL MABRUR KLATEN



M Hanny Naufal
Direktur Utama



Rosid Wahyu Nugroho
Direktur

Mengetahui,



Ir. H. Syamsul Ma'arif
Komisaris Utama



Ruswanto, S.Tp, M.P
Komisaris